

**PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Peguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS UNP
sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

**MUTIA RENI
TM/NIM : 2015 / 15042087**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pengelolaan
Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar

Nama : Mutia Reni

Nim/TM : 15042087/2015

Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 April 2019

Disetujui oleh:
Pembimbing



Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D
19630401198903 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu, Tanggal 24 April 2019 Pukul 11:00 s/d 12.00 WIB

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar

Nama : Mutia Reni

Nim : 15042087

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

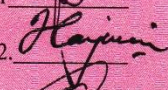
Padang, 24 April 2019

Tim Penguji

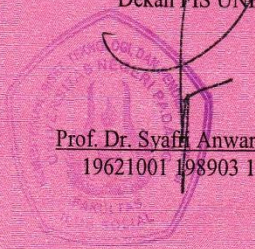
Nama

1. Ketua : Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D
2. Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
3. Anggota : Zikri Alhadi, S.IP., M.A

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Mengetahui
Dekan FIS UNP


Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd
19621001 198903 1 002

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Reni

Nim/TM : 15042087/ 2015

Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 09 Desember 1995

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 April 2019

Yang membuat pernyataan,



Mutia Reni

15042087/2015

ABSTRAK

MUTIA RENI : NIM 2015/15042087 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kinerja aparatur nagari di Kabupaten Tanah Datar masih ditemukan banyak penyimpangan yang disebabkan oleh perilaku individu itu sendiri maupun budaya yang ada didalam organisasi itu sendiri.

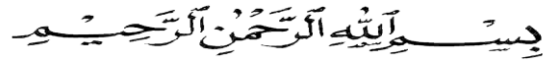
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan bentuk asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur nagari di Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah sebanyak 600 orang. sampel dalam penelitian ini berjumlah 240 responden yang ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 5% dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Multi Stage Random Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket yang disebarakan kepada responden dengan pengukuran *skala likert*. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai *Adjusted R Square* 0,233 %. Dengan demikian, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 23,3%. Selanjutnya sisanya sebesar 76,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini maka saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu agar aparatur pemerintahan nagari lebih meningkatkan dan memperbaiki budaya organisasi yang ada dalam pemerintahan nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan nagari sehingga tercapainya pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Kata Kunci : *Budaya Organisasi, Kinerja, Pengelolaan Keuangan.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana atas berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih pada:

1. Bapak Prof.Dr.Syafri Anwar,M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, S.H,. M.Hum,. Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si,. Ph.D selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani,. M.Si selaku dosen penguji I dan Bapak Zikri Alhadi, S.IP,. MA selaku dosen penguji II.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar beserta staff administrasi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
6. Seluruh staff karyawan dan karyawanati kepustakaan dan staff administrasi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
7. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ediwarman dan Ibunda Ermawati terima kasih yang tak terhingga atas do'a, motivasi, pengorbanan dan ketulusannya mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
9. Teman-teman Sepenelitian 2018 yang berjuang mendapatkan gelar Sarjana.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Administrasi Publik angkatan 2015, Universitas Negeri Padang.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, April 2019

Mutia Reni

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	14
1. Pengelolaan Keuangan Nagari dan Indikator Pengukur Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	14
2. Konsep Budaya Organisasi	23
3. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja.....	34
B. Aparatur Pemerintah Nagari	36
C. Penelitian Terdahulu	37
D. Kerangka Konseptual	39
E. Hipotesis Penelitian	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C. Operasionalisasi Variabel.....	43

D. Populasi dan Sampel Penelitian	46
E. Instrumen Penelitian.....	48
F. Jenis, Teknis dan Alat Pengumpulan Data.....	48
G. Validitas dan Realibilitas	49
H. Teknis Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	58
B. Profil Responden	61
C. Temuan Khusus	67
D. Pembahasan	93
E. Keterbatasan Penelitian	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

Table 3.1 Jumlah Aparatur Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar	47
Tabel 3.2 Pengukuran Variabel	48
Tabel 3.3 Uji Validitas Variabel Pelatihan	50
Tabel 3.4 Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari	51
Tabel 3.5 Uji Reliabilitas Variabel Pelatihan	52
Tabel 3.6 Uji Reliabilitas Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari	53
Tabel 4.1 Profil Responden Menurut Klarifikasi Umur	62
Tabel 4.2 Profil Responden Menurut Jenis Kelamin	63
Tabel 4.3 Profil Responden Menurut Status Perkawinan	64
Tabel 4.4 Profil Responden Menurut Pendidikan Terakhir	64
Tabel 4.5 Profil Responden Menurut Jabatan	65
Tabel 4.6 Profil Responden Menurut Jumlah Gaji	65
Tabel 4.7 Profil Responden Menurut Pendapatan Bersih	66
Tabel 4.8 Profil Responden Menurut Masa Kerja	67
Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Budaya Organisasi	67
Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Transparansi	69
Tabel 4.11 Deskripsi Variabel Akuntabilitas	70
Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Partisipasi	71
Tabel 4.13 Deskripsi Variabel Tertib dan Disiplin Anggaran	72
Tabel 4.14 Deskripsi Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari	73
Tabel 4.15 Hasil Kontribusi (R) Variabel Pengambilan Resiko terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	74
Tabel 4.16 Hasil Uji Anova (F) Variabel Pengambilan Resiko terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	74
Tabel 4.17 Hasil Uji T Variabel Pengambilan Resiko terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	75
Tabel 4.18 Hasil Kontribusi (R) Variabel Inovasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	76

Tabel 4.19 Hasil Uji Anova (F) Variabel Inovasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	76
Tabel 4.20 Hasil Uji T Variabel Inovasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	77
Tabel 4.21 Hasil Kontribusi (R) Variabel orientasi hasil terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	77
Tabel 4.22 Hasil Uji Anova (F) Variabel orientasi hasil terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	78
Tabel 4.23 Hasil Uji T Variabel Orientasi Hasil terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	79
Tabel 4.24 Hasil Kontribusi (R) Variabel Orientasi Orang terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	79
Tabel 4.25 Hasil Uji Anova (F) Variabel Orientasi Orang terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	80
Tabel 4.26 Hasil Uji T Variabel Orientasi Orang terhadap Pengelolaan Nagari.....	80
Tabel 4.27 Hasil Kontribusi (R) Variabel Orientasi Tim terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	81
Tabel 4.28 Hasil Uji Anova (F) Variabel Orientasi Tim terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	82
Tabel 4.29 Hasil Uji T Variabel orientasi tim terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	82
Tabel 4.30 Hasil Kontribusi (R) Variabel Keagresifan terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	83
Tabel 4.31 Hasil Uji Anova (F) Variabel Keagresifan terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	83
Tabel 4.32 Hasil Uji T Variabel Keagresifan terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	84
Tabel 4.33 Hasil Kontribusi (R) Variabel Kemantapan/stabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	85
Tabel 4.34 Hasil Uji Anova (F) Variabel Kemantapan/stabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	85

Tabel 4.35 Hasil Uji T Variabel Kemantapan/stabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	86
Tabel 4.36 Hasil Uji Multikoleniaritas Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan .	89
Tabel 4.37 Hasil Uji Autokorelasi Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan .	90
Tabel 4.38 Hasil Kontribusi (R) Pengaruh Variabel Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan	90
Tabel 4.39 Hasil Uji Anova (F) Pengaruh Variabel Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari.....	61
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Nagari	87
Gambar 4.3 Hasil Uji Linearitas Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	87
Gambar 4.4 Hasil Heteroskedastisitas Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	88
Gambar 4.5 Pengaruh dan Kontribusi Variabel X terhadap Y.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran Angket Penelitian

Lampiran Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian

Lampiran Biodata Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “setiap anggaran, pendapatan dan belanja daerah yang disebut dengan APBD ialah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah” Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatan dan keuangan daerah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjadikan pemerintahan daerah memiliki kemandirian dan mempercepat laju pertumbuhan di daerah. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan yang ada di daerah karena mengharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam memajukan pemerintahan daerahnya.

Perihal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “ Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu bentuk sistem pembagian keuangan secara adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”. Dengan adanya undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa pemerintahan memberikan dana bagi pemerintahan daerah secara adil dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing yang akan

dikelola oleh pemerintahan daerah dan selanjutnya akan digunakan oleh pemerintahan daerah untuk mengurus kebutuhan daerahnya masing-masing.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 yang merupakan bentuk perubahan kedua dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan semua kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Oleh karena itu apapun yang mencakup semua kegiatan yang di jelaskan dalam pasal 1 tersebut merupakan bentuk pengelolaan keuangan daerah dimana nantinya akan dikelola oleh pejabat daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah ialah kepala daerah yang merupakan seseorang yang mempunyai kewenangan dalam jabatannya untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah akan dijabat oleh kepala Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan ini diharapkan agar pemerintahan daerah menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan desa yang dimiliki.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa, dituliskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah Kabupaten mengalokasikan anggaran paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus kepada pemerintahan desa. Dengan adanya anggaran alokasi dana 10 persen dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten, dengan itu desa harus mampu untuk memanfaatkan dana yang telah diterima semaksimal mungkin dalam memajukan dan mengembangkan setiap potensi yang ada di desa masing-masing. Dalam dana yang dialokasikan kepada pemerintahan nagari digunakan paling sedikit 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan paling banyak 30% digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional badan pemusyawaratan desa, insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Undang-Undang No. 18B Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa; Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Dimana maksudnya bahwa negara mendukung bberbagai macam bentuk pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa baik itu dalam tingkat provinsi, kabupaten dan kota ataupun desa. Nagari merupakan salah satu bentuk pemerintahan terendah yang berada di Indonesia. Nagari merupakan nama lain dari desa yang ada di Indonesia yang tepatnya berada di Sumatera Barat. Desa adalah suatu desa adat dimana didalamnya termasuk Pemerintahan Nagari di Minangkabau yang merupakan salah satu bentuk pemerintahan adat yang sudah diakui oleh pemeritah.

Sebagaimana yang dikatakan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar No. 11 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Nagari di olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikatakan bahwa setiap belanja daerah yang diatas namakan nagari harus memiliki bukti yang lengkap dan sah. Pengelolaan Keuangan Nagari akan dikelola dalam kurun waktu 1 tahun anggaran yang terhitung dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 30 desember. Dalam Peraturan Bupati tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar dikelola dengan disiplin, transparan dan setiap pengeluaran yang terjadi harus memiliki bukti yang jelas. Namun pada kenyataannya masih dapat ditemukan pelanggaran atau penyimpangan mengenai pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar dalam pengimplementasiannya.

Salah satu contohnya yaitu kekecewaan masyarakat yang disampaikan melalui salah satu akun media masa yakni *Padang Today* yang bernama Toni

Febrian yang di unggah pada hari Senin (18/12/17) pukul 18.15 Wib yang mengeluhkan mengenai janji dari pemerintah. Dalam permasalahan ini pemerintah masih belum memperbaiki jalan yang berada di Jorong Melati Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar. Toni mempermasalahkan keadaan jalan yang masih sangat memprihatinkan dengan memberikan bukti dalam bentuk beberapa foto yang di unggah didalam akun media sosialnya. Ia juga menanyakan alokasi dana untuk jalan di Jorong Melati, sementara APBD 2018 sudah disahkan sebesar Rp 1.340 Triliun. Dalam menanggapi permasalahan ini kepala Jorong Melati mengakui keadaan jalan yang masih sangat memprihatinkan tersebut. (Sumber Berita : <http://www.padang-today.com> di akses Pada Tanggal 25 Desember 2017)

Permasalahan lainnya yang membahas hal yang hampir serupa diantaranya yaitu dugaan penyalahgunaan dana proyek abal-abal di Nagari Sungai Tarab. Tepatnya di Jorong Koto Panjang Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Jenis kegiatan berupa pengecoran jalan Piliang , dalam kegiatan tersebut diduga kuat adanya indikasi korupsi dengan pekerjaan proyek asal jadi. Hal tersebut terlihat dari adanya penyimpangan spesifikasi pekerjaan dalam proyek jalan tersebut. sedangkan menurut Kaur Pembangunan Nagari Sungai Tarab, Hamzah, proyek jalan tersebut merupakan tanggung jawab dari TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Sedangkan speknya seperti ketebalan dari rabat beton yang dikerjakan sudah sesuai. Namun kenyataannya pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang di temukan di lapangan. Dalam kasus yang sama pada proyek pengecoran jalan Piliang Ganjak, Jorong Koto Panjang juga mengalami hal yang sama. Namun Walinagari Sungai Tarab, M. Rizal

mengatakan bahwa dalam pengerjaan proyek jalan tersebut sudah selesai dan tidak ada masalah dan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan Walinagari tersebut nyatanya juga tidak sesuai dengan apa yang di temukan di lapangan. (Dwi, 2017)

Masalah lainnya yang juga hampir serupa yaitu korupsi yang dilakukan oleh mantan Walinagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar yang melakukan tindak pidana korupsi mengenai penggunaan dana *reward* lomba nagari berprestasi baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional yang merugikan negara sebesar Rp. 94,2 Juta, kata kepala Kejari Batusangkar M.Fatria di Batusangkar. Penyelewengan yang dilakukan oleh mantan Walinagari Limo Kaum, Meriyaldi telah melanggar Peraturan Bupati Tanah Datar mengenai pengelolaan keuangan daerah. (Andika Wahyu, 2016)

Dari masalah yang dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa masih adanya dugaan penyimpangan terhadap alokasi dana nagari yang disebabkan karena kurang baiknya kinerja pengelolaan keuangan nagari yang dilakukan oleh aparatur nagari di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu dari masalah yang dijelaskan dapat dilihat bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan dibeberapa nagari di Kabupaten Tanah Datar masih kurang transparan.

Selain beberapa masalah yang dipaparkan di atas terdapat juga masalah lainnya mengenai kinerja perangkat nagari di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2018, Kaur Perekonomian Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan dalam wawancara tersebut mengatakan bahwa masih adanya pengelompokan-pengelompokan karyawan dalam pengelolaan keuangan nagari di nagari tersebut. Selain itu dalam

melaksanakan pekerjaan pengelolaan keuangan nagari perangkat nagari yang ada tidaklah solid.

Masalah lainnya disampaikan oleh Walinagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto mengatakan bahwa kinerja perangkat di Kenagarian Pandai Sikek lebih mengutamakan dokumentasi dari pada hasil. Sedangkan masalah lainnya di kemukakan oleh Walinagari Tigo Koto Kecamatan Rambatan pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2018 yang mengatakan “ kami melihat unsur-unsur walinagari itu tidak adanya tupoksi yang jelas yang mereka kerjakan dimana tupoksinya sudah ada tapi mereka tidak bisa menjabarkan fungsi itu, karena selama ini mungkin sudah diberikan pembekalan dan lain-lain tetapi tidak dievaluasi atau mungkin mereka tidak ditugasi dengan pekerjaan yang dilatih tersebut sehingga kami melihat khusus nagari tigo koto yang mempunyai GW hanya bendahara. Jadi waktu terjadi penggantian bendahara tau-tau tidak ada yang bisa kerja satu orangpun, hal ini yang diresahkan tigo koto saat ini, makanya sekarang bendahara dan kaur-kaur kami itu ada yang ke nagari tetangga untuk belajar. Akhirnya karena kekurangan ilmu pekerjaan mereka biasanya di serahkan kepada bendahara, jadi waktu bendahara kita tukar terpaksa sekarang yang kaur, yang sekretaris ke nagari tetangga untuk belajar.

Selain itu masalah yang peneliti temukan dilapangan adanya salah satu nagari yaitu Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo yang bersikap kurang baik dalam memberikan pelayanan. Dapat dilihat dari sikap aparatur nagari yang cenderung apatis dan bersikap dingin saat peneliti melakukan penelitian di nagari tersebut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi pada organisasi tersebut kurang baik. Dikarenakan budaya organisasi memberikan

pengaruh terhadap lingkungan dalam organisasi yang mana nantinya akan mempengaruhi cara bertindak, pola pikir individu yang ada di dalam organisasi.

Dari pemasalahan yang telah dijelaskan dapat dilihat bahwa masih kurangnya penerapan budaya organisasi pada kenagarian yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dapat di lihat dari pengertian budaya organisasi dimana menurut Wiraman (2007) budaya organisasi merupakan norma, nilai-nilai, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan sebagainya yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin, anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku para anggotanya dalam memproduksi produk, melayani para konsumen dan mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi (2013), dimana ia mengatakan bahwa karakteristik budaya organisasi diantaranya yaitu inovasi dan pengambilan resiko, berorientasi kepada hasil, berorientasi kepada orang, berorientasi kepada tim, keagresifan, dan kemandirian.

Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu ditemukan hasil yang menyatakan bahwa suatu budaya organisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dimana penelitian yang dimaksud diantaranya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Ali Baba (2012) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi, Komunikasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi kasus PT. Semen Bosowa Maros). Penelitian lainnya yang menyatakan hal yang hampir serupa diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diva Hazluna (2014) yang melakukan penelitian terhadap

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi kasus di Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang) juga menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara budaya organisasi dan kinerja pegawai pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ridho Eko Saotro dan Abdu Muthalib (2016) yang melakukan penelitian terhadap Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Sales (*Studi kasus PT . Sumatera Berlian Motors*) yang menemukan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Budaya Organisasi terhadap kinerja sales pada PT. Sumatera Berlian Motors”.

Namun demikian juga terdapat penelitian yang tidak sesuai dengan penelitian yang dijelaskan diatas, dimana penelitian yang dilakukan oleh Enizawati (2008) yang melakukan penelitian terhadap Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran Dengan Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi empiris pada satuan kerja unit perangkat daerah di Kabupaten Tanah Datar) yang menemukan bahwa Budaya organisasi yang berorientasi pada orang tidak dapat memperkuat hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian dari hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat dua penelitian yang berbeda namun dengan variabel yang sama.

Dari penjabaran masalah yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar”. Penelitian ini merupakan intisari dari hasil penelitian skripsi dan merupakan bagian dari penelitian payung yang dilakukan oleh Syamsir (2017) dengan judul *Model*

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah tersebut, yaitu;

1. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset nagari pada beberapa nagari di Kabupaten Tanah Datar
2. Kurangnya keinginan dari pemerintah untuk merealisasikan janjinya.
3. Tidak adanya keinginan untuk mengawasi kinerja perangkat nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.
4. Kurangnya keinginan perangkat nagari untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga mereka tidak tau dengan tupoksi bidangnya pekerjaanya masing-masing
5. Adanya Walinagari yang tidak transparan terhadap kasus penyalahgunaan dana nagari di kabupaten tanah datar
6. Kurangnya nilai-nilai organisasi yang mempengaruhi anggota organisasi sehingga melakukan penyelewengan.
7. Kurangnya inovasi individu untuk melaksanakan tupoksi sehingga melakukan penyimpangan berupa korupsi.
8. Kurangnya budaya organisasi di kantor walinagari Kabupaten Tanah Datar sehingga bisa mempengaruhi terhadap kinerja pegawai dalam pengelolaan keuangan nagari.

C. Batasan Masalah

Mengingat ada beberapa masalah yang dikemukakan penulis pada latar belakang dan karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga dalam penelitian oleh sebab itu penulis mencoba membatasi lingkup penelitian, dimana batasan masalah yang diteliti ialah pengaruh budaya organisasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Dimana ada beberapa indikator yang akan digunakan dalam mengukur pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Indikator yang akan digunakan yaitu; inovasi dan pengambilan resiko, orientasi kepada hasil, orientasi kepada orang, orientasi kepada tim, keagresifan, kemantapan atau stabilitas.

D. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya yaitu “ Apakah Terdapat Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar”. Dimana secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pengambilan Resiko terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apakah terdapat pengaruh Inovasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar?
3. Apakah terdapat pengaruh Orientasi Hasil terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar?
4. Apakah terdapat pengaruh Orientasi Orang terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar?

5. Apakah terdapat pengaruh Orientasi Tim terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar?
6. Apakah terdapat pengaruh Keagresifan terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar?
7. Apakah terdapat pengaruh Kemantapan/Stabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar?
8. Apakah terdapat pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengambilan resiko terhadap pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mengetahui pengaruh inovasi terhadap pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk mengetahui pengaruh orientasi hasil terhadap pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar
4. Untuk mengetahui pengaruh orientasi orang terhadap pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar
5. Untuk mengetahui pengaruh orientasi tim terhadap pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar
6. Untuk mengetahui pengaruh keagresifan terhadap pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar
7. Untuk mengetahui pengaruh kemantapan/stabilitas terhadap pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar

8. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan konsep ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu administrasi negara tentang Budaya Organisasi, Perilaku Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Keuangan Publik.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Bagi perangkat nagari, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan nagari.
- b. Bagi wali nagari, penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan budaya organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan nagari. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperbaiki dan memelihara budaya organisasi demi meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan nagari.
- c. Bagi peneliti, secara akademis dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar Sarjana Administrasi Publik di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.